

Kritik Sosial dalam buku Republik #Jancukers

Karya SUJIWO TEJO

STKIP PGRI JOMBANG

Jl. Pattimura III.20.Jombang 61418. Telepon(0321)861319

NANDA RISKY ARDHANA

denrisky17@gmail.com

ABSTRACT

Social criticism is a form of communication in society that aims or functions as a control over the course of a social system or community process. According to Marbun, social criticism is a phrase that consists of two words, namely criticism and social. The use of qualitative methods in this research is descriptive, while the object of research is the book of the Republic of Jancukers by Sujiwo Tejo. The data in this study are quotes from the Republic of Jancukers books which are included in the form of Analysis and qualitative. Based on the results of the data analysis, it was found that the nature of the Republican book J # ncukers contains unique and unique insinuations towards the people, the government and even us as connoisseurs of this book. Sujiwo Tejo in this J # ncukers Republican book. The foresight of the people in measuring a discourse is different, there are those who think the satire of government patterns and policies is anti-government, some think that it is a form of love for the government, because they still care. When speaking politeness and sin, it is only regional. For example, the word Jancuk is only understood by the people of East Java but is not understood by the people of Irian Jaya and the word actually has an interesting history and meaning.

Key words: Social Criticism, Republic of Jancukers, Sujiwo Tejo, Jancuk, diversity,

ABSTRAK

Kritik sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai control terhadap jalannya suatu system social atau proses bermasyarakat. Menurut Marbun, kritik sosial merupakan frase yang terdiri dari dua kata yaitu kritik dan social. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini yang bersifat deskriptif, sedangkan objek penelitiannya adalah buku *Republik Jancukers* karya Sujiwo Tejo. Data dalam penelitian ini adalah kutipan-kutipan buku *Republik Jancukers* yang termasuk dalam bentuk Analisis dan kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa dalam buku Republik J#ncukers berisikan sindiran unik dan khas terhadap masyarakat, pemerintah dan bahkan kita sebagai penikmat buku ini.. Semboyan yang terdapat di kaki kuat sang Burung Garuda “Bhineka Tunggal Ika” itulah cita-cita kecil dari Sujiwo Tejo dalam buku Republik J#ncukers ini.

Kejelian masyarakat dalam menakar sebuah wacana tentu berbeda ada yang beranggapan sindiran terhadap pola dan kebijakan pemerintah merupakan anti pemerintah ada pula yang beranggapan bahwa itu bentuk kecintaan kepada pemerintah, karena masih peduli. Apabila berbicara kesopanan dan dosa maka itu hanya bersifat regional. seperti contoh kata *Jancuk* itu hanya dipahami oleh masyarakat Jawa Timur namun tidak dipahami oleh masyarakat Irian Jaya dan kata tersebut sebenarnya memiliki sejarah dan makna yang menarik.

Kata-kata kunci : Kritik Sosial, Republik Jancukers, Sujiwo Tejo, Jancuk, keragaman,

PEDAHULUAN

Melalui sebuah karya sastra, pola pikir seseorang atau kelompok masyarakat dapat terpengaruh. Sebenarnya sastra merupakan salah satu kebudayaan, sedangkan salah satu unsur kebudayaan adalah sebagai sistem nilai. Karena itulah di dalam sebuah karya sastra tentu akan terdapat gambaran-gambaran yang merupakan sistem nilai. Nilai yang terkandung itu kemudian dianggap sebagai kaidah yang dipercaya kebenarannya, sehingga pola pikir masyarakat dapat terbentuk melalui karya sastra.

Junus (1985:3) berpendapat bahwa karya sastra hadir sebagai refleksi dari kehidupan masyarakat. Karya sastra merupakan cermin dari kehidupan masyarakat yang akan terus mewakili situasi dan keadaan sekitarnya. Sastra di samping sebagai karya seni, juga dapat dijadikan dokumen sejarah kebudayaan masyarakat pada masa dan tempat karya sastra itu dilahirkan.

Salah satu peran karya sastra adalah sebagai dokumen sosial yang menggambarkan suatu zaman dan tidak akan lepas dari nilai-nilai estetika. Dalam hal ini sastra sebagai suatu wacana yang merespon, mengkritik, atau menggambarkan situasi sosial masyarakat tertentu yang kemudian dikemas dan dipersembahkan kepada masyarakat pembaca. Meningat bahwa setiap tindakan komunikasi senantiasa mengandung kepentingan, apalagi komunikasi melalui media sastra tulis, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap tindakan komunikasi dalam karya sastra adalah suatu Wacana.

Karya sastra dianggap sebagai dokumen sosial dan gambaran suatu zaman tertentu yang monumental sekaligus estetis. Dalam hal ini sastra diposisikan sebagai suatu wacana yang

merespon, mengkritik, atau menggambarkan situasi sosial masyarakat tertentu yang kemudian dikomunikasikan kepada khalayak. Mengingat bahwa setiap tindakan komunikasi senantiasa mengandung kepentingan, apalagi komunikasi melalui media sastra tulis, layak jika dikatakan bahwa setiap tindakan komunikasi dalam karya sastra adalah suatu wacana.

Wacana yang merangkaikan unsur linguistik pada wacana bersama-sama unsur non-linguistik untuk memerankan kegiatan, pandangan, atau identitas individual atau sosial. Bentuk non-linguistik ini dapat berupa kepentingan ideologi, politik, ekonomi, atau budaya (Gee, 2005: 21 & 26 – 27).

Karya sastra merupakan hasil dari gejolak kegelisahan sastrawan tentang apa saja yang menjadi hiruk pikuk dalam kehidupan, sebab sastra mampu merekam dan melukiskan zamannya ketika ia dilahirkan. Dalam hal ini sastra dapat dengan leluasa memasukkan fakta historis, gambaran kondisi sosial, kultural, atau bahkan perenungan filosofi. Itulah sebabnya sastra dapat melewati garis demarkasi sejarah, sosiologi, filsafat, atau etnografi. Masalahnya, bagaimana sastrawan mengolah fakta itu menjadi fiksi (Mahayana, 2002: 328-329).

Republik Jancukers adalah negara idaman buah perenungan Sujiwo Tejo. Republik yang rakyatnya tiada punya kemunafikan. Masyarakat penghuni Republik Jancukers memiliki budaya keterbukaan. Negara Republik Jancukers tidak seutopia yang digagas Plato, tetapi ideal seperti yang dicita-citakan para pendiri negeri ini. Demikian kata Jakob Oetama pada pengantar. Dia melanjutkan bahwa kreativitas yang dimiliki Sujiwo Tejo cukup *nyentrik* dan orisinal. Referensi yang dipakainya berasal dari petuah-petuah kuno pewayangan.

Walaupun buku ini berjudul *Republik #Jancukers* bukan berarti hanya berisi cerita-cerita yang mengoleksi kata jancuk. Banyak macam hal yang cuma bisa disampaikan melalui akting, musik, dan seni rupa. Namun, juga ada banyak hal yang cuma bisa disampaikan melalui kata-kata. Demikian alasan mengapa buku ini ditulis oleh suami Rosana Nurbani.

Buku ini berisi refleksi sang Dalang Edan terhadap keadaan sekitar, mulai dari perilaku masyarakat hingga petinggi-petinggi negara.

METODE PENELITIAN

Menurut Endraswara (2003:12) bahwa tujuan utama penelitian karya sastra adalah untuk membuka tabir yang terkandung dalam teks. Karena karya sastra merupakan karya kreatif dan di dalamnya sarat dengan ideologi dan pemikiran manusia, maka penelitian sastra pun akan ke arah hal-hal tersebut, untuk membedah misteri makna teks sastra, tentu diperlukan teori tertentu yang relevan dengan subjeknya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Penelitian kualitatif atau *qualitative rescearh* merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari kualifikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Deskriptif analisis merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Secara etimologis, deskripsi dan analisis berarti menguraikan. Meskipun demikian tetapi tidak semata-mata menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya (Ratna, 2009:53). Oleh sebab itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan.

Pendekatan analisis wacana kritis merupakan salah satu penerapan metode kualitatif. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasi atau menafsirkan teks-teks yang ada tanpa meninggalkan konteks yang melatarbelakangi teks tersebut dilahirkan.

Metode penelitian mempunyai karakteristik acuan kebenaran penelitian sesuai dengan ranahnya. Kebenaran tersebut dimaksudkan supaya penelitian tidak melenceng dari kajian yang digunakan untuk meneliti. Karakteristik suatu metode ilmiah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan harus bersifat kritis, analitis, artinya metode menunjukkan adanya proses yang tepat dan benar untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah tersebut.
- 2) Pendekatan harus bersifat logis, artinya adanya metode yang digunakan untuk memberikan argumentasi ilmiah. Kesimpulan yang dibuat secara nyata dan rasional didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia.
- 3) Pendekatan bersifat objektif, artinya objektivitas itu menghasilkan penyelidikan yang dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula.
- 4) Pendekatan harus bersifat konseptual dan teoritis; oleh karena itu, untuk mengarahkan proses penelitian yang dijalankan, peneliti membutuhkan pengembangan konsep dan struktur teori agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
- 5) Pendekatan bersifat empiris, artinya metode yang dipakai didasarkan pada kenyataan.

Kritik sosial merupakan suatu aktifitas yang berhubungan dengan penilaian, perbandingan, dan pengungkapan mengenai kondisi sosial suatu masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai yang dianut ataupun nilai-nilai yang dijadikan pedoman. Dalam kehidupan tentu terjadi gesekan-gesekan antar masyarakat yang akan berujung sebuah permasalahan jika hal tersebut keluar dari rel nilai-nilai yang dijadikan pedoman. Timbulnya sebuah permasalahan karena kepentingan sosial yang berbeda pada setiap bentuk masyarakat, kemudian memandang keadilan relatif lebih bersifat subjektif, apa yang menurut sebagian kelompok sosial itu adil, akan tetapi belum tentu dengan pihak lain.

Hal di atas kemudian menimbulkan protes keras atau kritik. Kritik sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya suatu sistem sosial atau proses bermasyarakat. Kritik dapat dilakukan oleh siapa saja, kritik bisa dilakukan oleh para ilmuwan, baik ilmuwan dibidang sosial, politik, ekonomi, agama, serta dibidang pendidikan, kritik tidak harus dilakukan para ilmuwan, tetapi mengkritik dapat pula dilakukan oleh ahli seni atau sering juga disebut sebagai seniman. Sebagaimana yang dikatakan Wellek dan Austin (1989: 144). Sebagai pribadi, pengarang adalah seorang warga masyarakat yang tentunya mempunyai pendapat tentang masalah-masalah politik dan sosial yang penting, serta mengikuti isu-isu zamannya.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah praktik kritik sosial yang digambarkan pada buku Republik Jancukers. Bentuk Kritik sosial tersaji dalam data sebagai berikut :

Pada buku Republik jancukers pada sub Judul Skandal Jepit terdapat sebuah kritik kelas sosial perbedaan perlakuan dalam hukum dan tingkat sosial :

“Begitu juga sandal. Cuma ketambahan aksara “K”, maka sandal dengan skandal tak bisa dibandingkan lagi. Sandal jepit itu soal 5 tahun penjara, entah kalau skandal Century. Mengapa jauh berbeda bumi dan langit antara kasus pencurian sandal dan tragedi perbankan? Penyebabnya, mungkin, sandal jepit itu hal ikhwal kalangan bawah, yaitu kaki. Soal Bank Century sudah menyangkut urusan para kepala.” (RJ:9).

Hukum di Indonesia sangatlah tumpul bagi yang berada diatas (pemerintah) dan tajam sekali bagi yang berada di bawah (rakyat kecil). Realita sosial yang begitu mencoreng keadilan di bumi Indonesia, sehingga kepercayaan rakyat kecil sangat rendah terhadap hukum yang berlaku. Karena hukum dikendalikan kekuasaan. Prof Subekti, SH mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yaitu mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan selalu mencari dan menuntut dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang sama pula. Namun Mochtar Kusumaatmadja (dalam Sudikno. 2007), hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Praktik penentuan hukum itu sendiri tidak terlepas dari kekuasaan dan kewenangan dari pembuat kebijakan tersebut. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Di sini kita melihat betapa erat hubungan antara hukum, negara, dan kekuasaan itu.

Terdapat pula bentuk kritik sosial tentang ketidakpercayaan kepada lembaga tinggi Negara. Diungkapkan lebih lanjut oleh Sujiwotejo :

“Kalau memang kita Negara Maritim, seyogianya umpatan itu bukan “ke laut aja lo!” tapi “ke pengadilan aja lo!” atau “ke Kementerian Agama aja lo!” ... atau ke mana pun saja tempat buaya darat biasa hidup...” (RJ:10).

Kementerian Agama RI dinobatkan oleh KPK sebagai kementerian paling korup sepanjang tahun 2011. “Juara” Korupsi itu diumumkan tahun 2012. Hal tersebut juga dikuatkan oleh beberapa pemberitaan dimedia online. Seperti berikut diberitakan salah satu portal berita online Okezone.com

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi nilai merah terhadap Kementerian Agama (Kemenag) terkait rekomendasi pembenahan sistem anti korupsi di institusi yang dipimpin Suryadharma Ali tersebut. Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan Kemenag termasuk institusi yang paling bandel.

"Iya (paling bandel) karena banyak rekomendasi yng belum dilaksanakan. KPK sudah melakukan sistem pencegahan dengan kementerian dan lembaga lain," kata Abraham Samad di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (31/8/2012).

KPK pernah memberi 48 poin rekomendasi perbaikan sistem yang dinilai berpotensi korupsi. Namun, kata Abraham hanya empat poin rekomendasi yang dijalankan Kemenag.

Tahun ini Kemenag merekrut mantan pimpinan KPK M. Jasin sebagai Inspektur Jenderal. Menurut Abraham, sejak Jasin masuk, ada sejumlah perbaikan di kementerian tersebut.

Namun, Abraham menegaskan, KPK tetap akan menyoroti kelemahan-kelemahan sistem di Kemenag. "Meskipun di sana ada Yasin, KPK tetap menyoroti Kementerian Agama," katanya.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menambahkan lembaga negara lain yang mendapat nilai merah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Busyro mengatakan budaya suap dan kongkalikong dalam pengurusan administrasi masih terjadi di sana. "Ini karena pengawasan di sana lemah," kata Busyro.

(<http://news.okezone.com/read/2012/08/31/339/683567/kpk-kementerian-agama-masih-paling-korup>)

“Maka daripada sibuk korupsi, Kementerian Agama seyogianya lebih sibuk memperhatikan kaum ateis.” (RJ:13).

Juniadi Suwanto (1995) menyatakan bahwa korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan gratifikasi atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan atau keuangan negara ataupun masyarakat.

Tingginya tingkat korupsi di Indonesia mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi-instansi pemerintah. Awalnya, masyarakat berpendapat bahwa hanya ada 2 instansi di Indonesia yang bersih dari korupsi, yaitu KPK dan Kementerian Agama. Kedua instansi tersebut dianggap paling bersih, karena diisi oleh orang-orang terbaik dan terbersih di Indonesia. Kita patut bersyukur karena masih ada instansi pemerintah yang masih dipercaya.

Namun, kepercayaan masyarakat tersebut terjawab sudah. Kepercayaan besar yang sudah diberikan tersebut dijawab dengan korupsi, terlebih korupsi tersebut terkait dengan pengadaan kitab suci yang merupakan lambang agama yang seharusnya dihormati dan dijaga.

Kekhawatiran yang muncul atas peristiwa ini adalah timbulnya opini baru dari masyarakat kepada seluruh instansi pemerintah, yaitu “Kementerian Agama saja korupsi, apalagi yang lainnya“. Dan akhirnya akan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Dampak lain yang mungkin akan muncul akibat korupsi di Kementerian Agama tersebut adalah makin merosotnya mental bangsa. Dikhawatirkan akan ada pembenaran atas tindakan-tindakan buruk yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan ber-alibi bahwa pejabat yang bersih saja korupsi, maka akan menjadi wajar kalau tindakan tersebut dilakukan oleh mereka. Kata Korupsi berasal dari bahasa latin “corruptio” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Selain itu kata korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang buruk. Korupsi banyak juga yang disangkutkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.

Korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi bukanlah barang baru ditelingga kita atau bukan hal yang baru kita dengar dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dimana sangat mencerminkan mentalitas serta karakter kita yang disebabkan oleh banyak faktor, mungkin telah ada sejak awal sejarah manusia kecuali pada masa yang sangat lama dan jauh dari peradapan maju dimana secara konsep perilaku belum dikenal meskipun gejalanya bisa saja sudah ada.

Korupsi secara historis merupakan konsep dan perilaku menyimpang secara hukum, ketika secara sosial, budaya, dan politik telah terjadi pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik, yang diikuti dengan perasaan berhak atas keistimewaan (dengan mendapat dukungan diam-diam dari rakyat) maka terdapat kecenderungan untuk melihat bahwa pemanfaatan berbagai sumber daya finansial dan non finansial untuk kepentingan pribadi sebagai hal yang wajar.

Banyak yang coba mengkaji dan mengulas masalah korupsi di Indonesia, dimana menurut saya fenomena korupsi telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan di indonesia

terdahulu. Kedudukan diperjuangkan kepada orang atau kelompok yang mampu membayar untuk kemudian mereka diberi kedudukan yang berhak melakukan pemungutan pajak yang tanpa kontrol hukum sehingga penyimpangan yang terjadi sulit diperbaiki karena lemahnya kontrol pemerintah serta pendiaman oleh masyarakat. Kondisi ini jelas menunjukkan korupsi mempunyai akar historis yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat kita, dan makin meningkat seiring dengan upaya pembangunan yang masif yang menggunakan dana besar demi berkembang dan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat. Ini adalah salah satu peluang besar bagi para koruptor tersebut. Secara istilah banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang

berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama bahwa korupsi merupakan penggunaan yang korup secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah. Seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang memiliki pengaruhnya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. terkadang orang yang menawarkan imbalan atau hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam kondisi yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat. Atau bisa juga diartikan bahwa korupsi secara umum adalah apabila seorang pegawai negeri menerima

pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.

Korupsi adalah gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi kepentingan dan keuntungan pribadi, salah urus dan kesewenangan terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang/kekuasaan dan kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi ada dan terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan/kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi dan atau keluarga, sanak saudara dan teman.

“Dulu, waktu zaman Pak Harto ada sebutan OTB, Organisasi Tanpa Bentuk. Tapi itu hanya tinggal julukan. Pada dasarnya mereka berbentuk juga, seperti fulus. Tak ada yang tanpa bentuk. Bahkan amuba juga berbentuk meski bentuknya tidak berbentuk.” (RJ:14)

Presiden Soekarno dan presiden Soeharto, adalah dua mantan presiden yang menggores catatan sejarah. Mungkin mereka memang harus hadir tatkala zaman membutuhkan.

Soekarno memandu rakyat menuju kemerdekaan. Soeharto meletakkan dasar-dasar ekonomi modern.

Soekarno menjadikan Indonesia sebagai kekuatan regional yang dihormati, Soeharto menjadikan Indonesia negara yang dipandang secara ekonomi. Soekarno mengajak negara-negara terjajah menggalang kekuatan perlawanan. Soeharto meredakan ketegangan Asia Tenggara yang saling bertikai menjadi akur dalam ASEAN.

Ada keberhasilan, ada kegagalan. Ada perbedaan, tapi ada juga kemiripan sejarah. Karier politik Soekarno, umpamanya, berawal dari kegerahan dirinya menyaksikan imperialisme Hindia Belanda. Soekarno berjuang secara intelektual dan membangun pondasi bangsa. Dia semakin populer pada saat pemerintahan Jepang memanfaatkan kepiawaiannya berpidato sebagai propagandis yang mengampanyekan Asia Raya. Soekarno berjaya membangun

konsep keindonesiaan yang pada era Hindia Belanda kedengaran absurd, dan berhasil mengejawantahkannya pada saat-saat terakhir pendudukan Jepang.

Adapun karier Soeharto berawal di militer. Soeharto bergabung dengan barisan laskar Peta (Pembela Tanah Air), terlibat dalam serangkaian operasi militer penting melawan agresi Belanda dan perebutan Irian Barat (sekarang Papua). Soeharto menceburkan diri ke dunia politik dengan bermodalkan pengetahuannya militernya.

Soekarno kecewa dengan demokrasi liberal yang menguatkan ego partisan. Baginya, ego partisan adalah ancaman bagi revolusi. Lantas, ia bubarkan Dewan Konstituante dan menunjuk dirinya sebagai sang pemandu demokrasi yang bergotong royong, meskipun faktanya sistem yang ia ciptakan adalah sebuah kediktatoran. Dia, misalnya, meminggirkan faksi-faksi yang menentangnya, dan menempatkan orang-orang yang menyokongnya di parlemen.

Sebaliknya, pada saat kekuasaan Soekarno melemah, giliran Soeharto membersihkan parlemen dari para pendukung Soekarno. Soeharto juga menyingkirkan unsur-unsur perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan garis politiknya. Dengan begitu Soeharto berjaya mengekalkan dirinya sebagai penafsir tunggal demokrasi Pancasila secara legal. Tidak jarang perannya bak dewa, sedangkan perkataannya adalah sabda politik yang tegas dan keras. Perbedaan berarti pembangkangan.

Soekarno ketika membubarkan Dewan Konstituante pada tahun 1959 beranggapan “revolusi belum usai”. Kemudian Soekarno mengidentifikasi musuh-musuhnya sebagai kelompok kontrarevolusi, nekolim (neo kolonialis dan imperialis baru), antek asing, dan subversif. Adapun Indonesia adalah pemimpin negara-negara baru melawan para musuh itu.

Untuk menunjukkan supremasi Indonesia, Soekarno membangun persenjataan militer yang tangguh, memerangi Belanda di Irian Barat, dan melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Soekarno juga memerintahkan pembangunan simpang susun Semanggi, stadion

Senayan, TVRI, dan Monumen Nasional (Monas). Lantas diselenggarakanlah Pesta Olahraga Negara-negara Kekuatan Baru (Ganefo/Games for new emerging forces) sebagai tandingan Olimpiade. Semua dilakukan ketika ekonomi nasional morat-marit, sedangkan infrastruktur rusak berat.

Meskipun begitu, garis politik mercusuar ini berhasil memasukkan Irian Barat dalam peta nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kuat secara militer di Asia Timur. Sampai-sampai Federasi Malaysia dan Singapura— karena cemas —kemudian menjalin kerja sama pertahanan dengan Selandia Baru, Australia, dan Inggris (Five power defense agreement).

Sebaliknya, Soeharto yang cara berpikirkannya strategis-realis melihat retorika Soekarno tidak membumi, tidak sesuai dengan kondisi nyata rakyat yang melarat. Soeharto memilih bekerja sama dengan kaum teknokrat yang berorientasi kapitalistis. Lantas ia meminta bantuan keuangan kepada negara-negara yang dalam pandangan Soekarno imperialis-kolonialis baru. Slogan baru pada era Soeharto adalah pembangunan lepas landas. Sedangkan musuh baru yang diciptakan Soeharto untuk mengidentifikasi elemen-elemen pembangkangan adalah organisasi tanpa bentuk (OTB), gerakan pengacau keamanan (GPK), subversi, mbalelo dan kiri baru. Dengan kendali media massa yang ketat, slogan-slogan ini berhasil meredam simpati massa terhadap gerakan-gerakan kritis, kedaerahan, atau sektarian.

Menjelang akhir rezim orde baru berakhir tepatnya pada tahun 1996 hingga 1998 pergerakan perlawanan mahasiswa bertransformasi menjadi gerakan Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Menurut rezim orde baru saat itu OTB merupakan bentukan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dituduh berfaham komunis untuk mengelabui mahasiswa untuk menjadi anggotanya. Pemerintahan rezim orde baru merepresentasikan PRD sebagai biang keladi kekerasan yang terjadi pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai peristiwa kudatuli dan menjadikan PRD identik dengan PKI. Padahal PRD sebetulnya hanyalah pergerakan

buruh yang menuntut dicabutnya 5 paket undang-undang politik tahun 1985 dan dicabutnya dwifungsi ABRI. Tuntutan-tuntutan itulah yang membuat mahasiswa yang tidak memiliki kesatuan organisasi yang terorganisir semenjak tahun 1978 untuk ikut bergabung dan berpindah-pindah dari satu LSM ke LSM lainnya, karena menurut mereka dengan bergabung LSM mereka bisa menghindari undang-undang yang mem"pemudakan" lagi mahasiswa dan melakukan perlawanan untuk menggulingkan pemerintahan orde baru. Sehingga pada rentang waktu 1996 hingga 1998 mahasiswa menjadi "kutu loncat" LSM, atau lebih dikenal sebagai gerakan OTB ke OTB. Namun dalam konteks Oposisi Indonesia OTB adalah singkatan Oposisi Telah Berdiri (Soewarsono, 1999). Inilah yang menjadi tombak gerakan perlawanan mahasiswa di tahun 1998.

Sujiwo tejo dalam buku Republik #Jancukers juga mengkritik gejala sosial yaitu berupa perilaku mengagung-agungkan Negara maju, hal tersebut tertuang dalam tulisan berikut :

"Sampai-sampai banyak yang tak tahu kini beda antara "sila" dan "simpuh". Bisa jadi suatu saat dasar negara itu adalah Pancasila, saking tekuk lututnya kita pada seluruh kekuatan asing.

Asing kemudian dipertuhankan. Dan orang-orang jomblo akan bilang, "biarlah jodoh kami ada di tangan asing." (RJ:16).

"Tapi, sebenarnya, sekarang kita hidup dalam kurun mata uang Euro, US dollar, atau mata uang kebohongan?" (RJ:74).

Kapitalisme atau Kapital merupakan paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Kapitalisme merupakan cara produksi, secara luas dapat dijelaskan bahwa kapitalisme sebagai: "Suatu cara perekonomian yang berhubungan dengan produksi-produksi apa saja yang dapat diselenggarakan dalam suatu perusahaan Kapitalisme pada negara-negara berkembang terjadi akibat adanya ketergantungan dari negara- negara berkembang terhadap negara-negara maju. Dalam sistem modern, tidak ada satupun negara yang dapat hidup

sendiri atau berhasil memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya sendiri. Namun efek negatif ketergantungan sebuah negara itu telah menyuburkan kembali praktek kapitalis di banyak negara di dunia. Harapan negara-negara berkembang serta negara miskin yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara lain pada awalnya adalah agar mendapat kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi negara dan warga negaranya. Teori dependensi menganalisis teori modernisasi. Teori ini telah berhasil mematahkan dampak positif dari ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara maju. Teori ini didasari kenyataan lambannya pembangunan dan adanya ketergantungan dari negara dunia ketiga, khususnya di Amerika Latin. Teori dependensi memiliki saran yang radikal, karena teori ini berada dalam paradig neo-Marxis.

Di masa era globalisasi sepertinya sangat sulit bagi suatu negara untuk melepaskan diri dengan negara lain. Hubungan antar negara sepertinya menjadi keharusan. Teori tentang ketergantungan depensi tidak akan bisa digunakan dalam keadaan negara saat ini. Negara berkembang dan terbelakang harus memutuskan hubungan dengan negara maju supaya bisa maju. Didalam hukum ekonomi politik internasional dijelaskan mengenai motivasi pemberian bantuan luar negeri ini, seperti dikutip dalam buku *Ekonomi Politik Internasional: Studi Pengenalan Umum*, (Yanuar Ikbar:2002) mengatakan bahwa alasan pemberian bantuan oleh negara atau institusi tertentu, terutama adalah self interest politik, strategi dan ekonomi. Walaupun pada umumnya alasan itu berupa motivasi moral, bantuan kemanusiaan atau bantuan untuk kesinambungan proses hubungan komplementasi dan pembangunan pihak lain. Tetapi sangat sulit ditemukan bukti-bukti sejarah perkembangan bantuan luar negeri selama periode tertentu

Dalam buku *Republik J#ancukers* juga muncul kritik sosial tentang banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang vital dikuasai oleh asing yang tersaji dalam tulisan dibawah ini :

“Minum air mineral secara umum sahamnya dikuasai Perancis, seperti halnya pusat-pusat perbelanjaan. Minum teh dan pakai sabun mandi dan pasta gigi umumnya sahamnya digenggam Inggris. Minum susu sahamnya dipegang Belanda. Merokok pun sahamnya dikuasai Amerika. Sarapan? Berasnya dari Thailand.

Dan masih seambrek lainnya seperti telekomunikasi yang dikuasai Qatar, Malaysia, dan Singapura. Semen pun dikuasai Swiss, Meksiko, dan Jerman. Belum lagi pusat-pusat perbelanjaan sampai anak-anak tokonya yang menyeruak masuk sampai kampung-kampung.” (RJ:87/88).

“Tapi saya tidak tahu apakah dengan maksud serupa “Siasat Candu” itu, maka Paman Sam kini mempopulerkan makanan untuk Indonesia yang dinegara mereka sendiri jadi junk food.” (RJ:102).

Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang kaya raya, makanya tak aneh bila Indonesia dijuluki sebagai zamrud khatulistiwa. Potensi kekayaan alam Indonesia antara lain, kekayaan hutan, perkebunan, kelautan, BBM, emas dan barang-barang tambang lainnya.

Kenyataan ini sangat kontras dengan isi pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Pasal itu seakian telah diganti, bahwa kekayaan alam yang ada di negeri Indonesia ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran pemilik modal, investor asing.

Pada umumnya, di negara-negara Dunia Ketiga terdapat sejumlah faktor yang tidak memungkinkan mereka untuk terlalu mengandalkan mekanisme pasar dalam rangka mengembangkan diri seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang tergolong sebagai industri maju selama tahap-tahap awal pembangunannya. Mungkin alasan yang paling penting adalah bahwa pasar-pasar di kebanyakan negara-negara berkembang diliputi ketidak sempurnaan (Arndt dalam Todaro, 2006) . Hal inilah yang coba dijelaskan Sujiwotejo melalui tulisannya tersebut.

.Selain anggota dewan, para pejabat juga tak lepas dari mata Sujiwo Tejo, yang coba mengkritisi gejala banyaknya pejabat yang tersandung kasus.

“Alasannya, baik rokok dan pejabat dua-duanya sama, yaitu membahayakan bagi kesehatan. Bedanya, bungkus rokok diberi warning resiko rokok terhadap kanker, serangan jantung, dan lain-lain.

Bungkus pejabat, yaitu baju, tepatnya di bawah lencana, tak ada sematan warning bahwa korupsi bisa menyebabkan masyarakat stres sehingga kena kanker, serangan jantung, impotensi, dan lain-lain.” (RJ:39)

Korupsi Pada pengertian harfiah korupsi dapat diartikan sebagai suatu perilaku pejabat publik yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang ilegal.

Di Indonesia sendiri korupsi sudah merajalela dimana-mana dan kasus korupsi selalu saja bertambah setiap tahunnya. Mungkin ini dikarenakan setiap orang sudah tidak lagi menganggap korupsi sebagai pelanggaran hukum melainkan sudah menjadi kebiasaan yang umum.

Korupsi sangat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat sekitar. Adapun dampak korupsi yang terlihat secara langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut :

1. Kesejahteraan Umum Negara

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus “pro-bisnis” ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

2. Menghambat Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi.

Chetwynd et al dalam bukunya (2003) menyatakan bahwa korupsi akan menghambat pertumbuhan investasi. Baik investasi domestik maupun asing. Mereka memberi contoh fakta business failure di Bulgaria yang mencapai angka 25 persen. 1 dari 4 perusahaan di negara tersebut mengalami gagal dalam melakukan ekspansi bisnis dan investasi setiap tahunnya akibat korupsi penguasa. Lalu, terungkap pula dalam catatan Bank Dunia bahwa tidak kurang dari 5 persen GDP dunia setiap tahunnya hilang akibat korupsi. Kemudian Uni Afrika

menyatakan bahwa benua tersebut kehilangan 25 persen GDP-nya setiap tahun juga akibat korupsi.

3. Korupsi Akan Melemahkan Kapasitas Dan Kemampuan Pemerintah Dalam Menjalankan Program Pembangunan.

Pada institusi atau perangkat pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung lebih baik dan lebih murah. Terkait dengan hal tersebut, Gupta, Davoodi, dan Tiongson (2000) menyimpulkan bahwa tingginya angka korupsi ternyata akan memperburuk layanan kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, angka putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan.

4. Korupsi dapat berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak.

Baik individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain dapat meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan korupsi juga akan menyebabkan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama.

Rasa untuk saling percaya yang merupakan modal sosial yang utama akan hilang. Akibatnya, akan muncul fenomena distrust society, yaitu masyarakat yang kehilangan rasa percaya, baik antar sesama individu, maupun terhadap institusi negara. Perasaan aman akan berubah dengan perasaan tidak aman (insecurity feeling). Dalam bahasa Al-Quran dikatakan sebagai libaasul khauf (pakaian ketakutan).

Fakta bahwa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki tingkat ketidakpercayaan dan kriminalitas yang tinggi pula.

Sujiwo tejo juga menulis sebuah kritik sosial berupa perbedaan perlakuan antara rakyat biasa dengan pemimpin negeri seperti berikut :

“Di negeri #Jancukers mobil kepresidenan mengalah terhadap mobil yang mengangkut perempuan mau melahirkan. Siapa pun perempuan itu, pakai tas Hermes maupun tas kresek.” (RJ:54)

Presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi dibawah MPR, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu wakil Presiden (pasal 4 ayat 2 UUD 1945). Sebagai kepala negara, Presiden merupakan simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Pejabat negara seharusnya dipilih untuk melayani dan mendengar rakyat, bukan dilayani rakyat. Citra pemimpin bisa muncul tanpa harus bermewah-mewahan. Andai saja pemerintah menerapkan gaya hidup sederhana, tidak dengan mobil mewah, rumah dinas yang mewah, mungkin korupsi bisa ditekan. Seperti contoh India, mereka menerapkan fasilitas yang tidak mewah untuk negaranya, saat ini India bisa maju. Di luar itu kalau pejabat tidak bergaya hidup mewah berapa Devisa Negara bisa terselamatkan, yang selama ini Pajak yang kita bayar (Pajak kendaraan, Pajak Penghasilan, PPN/PPnBM, pajak restoran, dan berbagai jenis pajak lainnya) dipergunakan untuk menghidupi para pejabat yang katanya wakil rakyat.

Semua fasilitas dan gratifikasi yang diberikan oleh rakyat lewat pajak dipergunakan oleh para wakil yang tidak mewakilkan untuk dapat bergaya hidup mewah. Anggota DPR/MPR/DPD yang melakukan kunjungan keluar negeri, fasilitas kendaraan mewah keluaran terbaru, fasilitas rumah dinas, fasilitas yang katanya pembahasan UU/UUD.

Dalam tulisan diatas Sujiwotejo yang juga merupakan presiden Jancuker membeberkan pemikirannya tentang Republik impiannya. Bahwa sebuah pelayanan terhadap rakyat juga sama dengan apa yang diterima oleh pemimpin negeri ini.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian *kajian kritik sosial dalam buku republik jancukers karya sujiwo tejo* dan berdasarkan uraian yang dipaparkan pada bab hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Nampak jelas kata-kata yang dipilih penulis buku *Republik Jancukers* dalam menggambarkan buah pengamatan dan pemikiran Sujiwo Tejo selaku penulis. Seperti *bumi dan langit, Zaman Pak Harto, memuja dollar AS, Apel Washington, Apel Malang, Cicak Buaya, Pancasimpuh, Cabut gigi, rokok dan dikadali.*

Bentuk gramatika dalam teks buku *Republik Jancukers* dapat menggambarkan bentuk hegemoni dalam realitas masyarakat atau sebuah peristiwa. Terdapat beberapa data sebagai berikut; “*mempertanyakan*” dan “*memperjuangkan*” keduanya menuntut rakyat sebagai subjek harus aktif dan ini menunjukkan pasifnya pemerintah yang seharusnya aktif. Kata “*petinggi*” mengalami proses gramatikal yang mempunyai makna para penguasa. “*disia-siakan, dijadikan, dan dibolehkan*” adalah contoh kata yang berbentuk hegemoni yang juga mengalami perubahan gramatikal.

Dimensi praktik kritik sosial dalam buku *Republik Jancukers* terbagi atas dominasi kelas sosial terhadap kelas sosial lain seperti kritikan hukum di Indonesia bagaikan pisau tajam di bawah tumpul di atas. contoh dalam kasus pencurian sandal jepit yang langsung di vonis 5 tahun sedangkan kasus skandal Century tidak kunjung jelas. Ketidak jelasan hukum di kalangan atas membuat masyarakat jenuh dan tidak percaya pada instansi pemerintahan. Sindiran itu juga digambarkan dalam buku ini seperti berikut; “*ke pengadilan aja lo!*” atau “*ke Kementerian Agama aja lo!*”.

Selain itu dimensi praktik sosial dalam buku *Republik Jancukers* terdapat juga dominasi suatu negara terhadap negara lain. Kritikan bangsa kita yang terlalu memuja negeri orang lain seperti Amerika juga nampak jelas disampaikan dalam buku *Republik*

Jancukers. “Bisa jadi suatu saat dasar negara itu adalah Pancasila, saking tekuk lututnya kita pada seluruh kekuatan asing”. Tidak sampai disitu kekuatan asing juga menguasai ekonomi bangsa Indonesia secara menyeluruh, yang tergambar jelas pada data berikut; “Minum air mineral secara umum sahamnya dikuasai Perancis, seperti halnya pusat-pusat perbelanjaan. Minum teh dan pakai sabun mandi dan pasta gigi umumnya sahamnya digenggam Inggris. Minum susu sahamnya dipegang Belanda. Merokok pun sahamnya dikuasai Amerika. Sarapan? Berasnya dari Thailand. Problematika sosial banyak disinggung begitu kompleks dalam kritiknya yang dituangkan di buku *Republik Jancukers*.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang disajikan, yakni penelitian kritik sosial yang ada dalam buku *Republik Jancukers* Karya Sujiwo Tejo dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Buku yang berisi kritikan, sindiran, dan nasihat terhadap orang Indonesia mulai dari kalangan remaja hingga dewasa, termasuk di dalamnya masyarakat umum, tokoh masyarakat, artis, aktor, kalangan akademisi, khususnya para pemimpin bangsa ini, legislatif, yudikatif, dan eksekutif mungkin akan bisa menjadi bahan untuk menjadikan Indonesia lebih baik, karena orang-orang yang mau berkarya dan mampu menghadirkan keadaan pemerintah dan masyarakat saat ini merupakan orang-orang yang peduli terhadap keadaan bangsa

2. Bagi Lembaga dan Mahasiswa

buku *Republik Jancukers* bukanlah buku yang "saru" untuk dibaca dan diteliti. Dan penelitian ini ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan wawasan kesusastraan bagi akademisi di STKIP PGRI Jombang dan juga pembaca lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah Darma, Yoce. 2009. Analisis Wacana Kritis. Bandung: Yrama Widya
- Amtu, Onisimus. 2011. Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Badara, Aris. 2012. Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chaer, Abdul. 2007. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta..
- Depdiknas, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2012. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Bandung: Yrama Widya.
- Eriyanto. 2009. Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS.
- Faruk. 1999. Pengantar Sosiologi Sastra; dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar